

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Djaja S. Meliala, *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang –Undang Hukum Perdata*, Cet.1, Nuansa Aulia, Bandung, 2008
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007.
- Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- G. W. F Hegel, *Filsafat Sejarah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- H. L. A Hart, *The Concept of Act (Konsep Hukum)*, Nusa Media, Bandung, 2009.

- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Juswito Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- J. Kartini Soedjendro, “Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik Tafsir Sosial Hukum PPAT-Notaris Ketika Menangani Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang berpotensi Konflik”, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Michael Sugijanto, *The Art of Contract Drafting: Seni Menyusun Kontrak Hukum Profesional Mulai dari Tahap Negosiasi Hingga Finalisasi*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2021.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Mulyoto, *Perjanjian, Teknik Cara Pembuatan dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Business Act, Yogyakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Pascasarjana, 2003.
- R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 2005.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 11, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Satjpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sjaifurrahman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris*, Lingkar Kenotariatan, Cet. 2, Lingkar Kenotariatan, Jambi, 2020.

II. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 03. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2021 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah

Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 594/493/AGR.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2584 K/Pdt/1986 tanggal 14 April 1998.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/1988 tanggal 19 April 1990.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1991 K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3332 K/Pdt/1994 tanggal 18 Desember 1997.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119 K/TUN/2000 tanggal 17 Oktober 2002.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 316 PK/Pdt/2000 tanggal 29 Juni 2004.

Putusan Kasasi Nomor 1082 K/Pdt/2013

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 281/Pdt.G/2020/PN Sby

III. JURNAL, ARTIKEL, MAKALAH DAN KARYA ILMIAH

Alfiansyah, dkk, “*Urgency Hinding Sale Agreement Deed of Land that Made by Notary*”, Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana, Universitas Brawijaya, 2015

Arkie V. Y Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik*, Magister Hukum Ekonomi Salemba, Jakarta, 2012.

Anna Triningsih dan Nurul Qur’ani, “Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”, Jurnal Konstitusi, Vol.14, No. 4, 2017.

Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, 2000.

Aulia Gumilang Rosadi, “Tanggung Jawab Notaris dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuatnya”, JCH (Jurnal Cendikia Hukum), Vol.5, No.2, 2020.

Bambang Eko Mulyono, “Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Untuk Menjual yang dibuat oleh Notaris”, Jurnal Independent Vol.2, Lamongan, 2013.

Charles Delon Tunas, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Asas Terang Dan Tunai”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2, 2019.

Christopher Nicolas Cowandy, “Kedudukan Hukum Perjanjian Utang-Piutang di Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli”, Journal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vo. 9, No. 4, Medan, 2021.

- Clara Vania, Gunawan Djajaputra, “Keabsahan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Jurnal Hukum Adigama*, 2020.
- Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3, Jakarta, 2015.
- Dina Rahmawati, “Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Melalui Kuasa Mutlak”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 27, No. 4, 2021.
- Edi Hudiata, “Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No.2, 2017.
- Fauzia Tifany Dinnar, “Pembuatan Akta Kuasa Mutlak sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah yang dibuat di hadapan Notaris” Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Galuh Hapsari, “Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Hal Terjadi Sengketa”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 2018.
- Gedion Ardana Reswari, “Surat Kuasa Mutlak Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3, No.1, Jember, 2014.
- Haripin A Tumpa, “Surat Kuasa Mutlak”, *Majalah Varia Peradilan*, No. 142, Juli 1997.
- Herlien Budiono, “Pengikat Jual-Beli dan Kuasa Mutlak”, *Majalah Renvoi*, edisi tahun I, No. 10, 2004.
- Lubnah Aljufri, “Kekuatan Hukum Pembuktian Perjanjian pengikatan jual beli (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 120/Pdt.G/2009/PN.Dpk)” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Made Ara Denara Asia Amansangsa dan I Made Dedy Priyanto, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Transaksi Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan”, *Kertha SemayaSjaif: Journal Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, Vol. 8, No. 1, Jimbaran, 2019.
- Prayoto, “Aspek Hukum Terhadap Klausul Kuasa Mutlak dalam Akta Perjanjian Jual Beli Tanah”, Tesis Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

- Rizki Tri Anugrah, “Perlindungan Hukum Konsumen Properti Atas Sistem *Pre Project Selling* di Kota Batam”, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 7 No. 1, 2019.
- Safira Dini Laksita, Ana Silviana, dan R. Suharto, “Legalitas Kuasa dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) (Studi di Kota Semarang), Diponegoro Act Journal, Vol. 6, No.1, Semarang, 2017.
- Setiono, “Rule of Act (Supremasi Hukum)”, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Supriyadi, “Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dalam Perspektif Hukum Pertanahan”, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Vol. 9, No. 2, Malang, 2016.
- Teguh Tresna Puja Asmara dkk, “Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No.1, 2020
- Via Aulia dan Harsanto Nursadi, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan merumuskan pemberian Kuasa Mutlak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/PDT.G/2019/PN.KRS)”, Pakuan Act Review, Vol. 08, No.01, Depok, 2022.
- Wawan Setiawan, “Komentar Dan Tantangan Terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT Menurut dan Di Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Media Notariat, Majalah Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia, No. 12-13 Tahun IV, 1989.
- Yassir Arafat, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”, Jurnal Rechts, Universitas Islam Jember, Vol. IV, No. 2, Jember, 2015.
- Yati Nurhayati, dkk, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, Issue 1, Banjarmasin, 2021.
- Yulia Amborowati, “Kekuatan Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak atas Tanah dan Bangunan yang Belum Terdaftar”, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan, Vol. 18, No. 1, Surabaya, 2020.

IV. INTERNET

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-hukum-PPJB-dalam-proses-jual-beli-tanah-lt6086d9ebd6b6d>

[https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjiankomersial/#:~:text=Pasal%201338%20ayat%20\(3\)%20KUH,%2C%20kebiasaan%20dan%20unang%2Dundang](https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjiankomersial/#:~:text=Pasal%201338%20ayat%20(3)%20KUH,%2C%20kebiasaan%20dan%20unang%2Dundang)

<http://secoact.com/id/perjanjian-jual-beli-tanah-dengan-hak-membeli-kembali/>

[https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understandingmou.bpkp#:~:text=Memorandum%20of%20Understanding%20\(MoU\)%20dalam,apa%20yang%20dinamakan%20Nota%20Kesepahaman](https://www.bpkp.go.id/sesma/konten/320/penyusunan-memorandum-of-understandingmou.bpkp#:~:text=Memorandum%20of%20Understanding%20(MoU)%20dalam,apa%20yang%20dinamakan%20Nota%20Kesepahaman)

<https://aa-actoffice.com/kuasa-mutlak-sebagai-pemindahan-hak-atas-tanah/>

<https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>